

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bencana adalah sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam jiwa dan disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan berdampak pada aspek psikologis. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Lebih lanjut di dalam Pasal 1 ayat (2) UU PB tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Tingginya potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal seperti letak wilayah, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, aktivitas manusia, dan lainnya (Fitriani dkk., 2021). Selain itu, juga dipengaruhi dengan wilayah Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan perubahan cuaca dan suhu berpengaruh pada perubahan iklim yang tidak menentu (Rosyida dkk., 2019).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa Pulau Jawa menjadi daerah yang paling rawan bencana. Banjir menjadi bencana yang paling banyak menimpa daerah-daerah di Pulau Jawa. Jika dilihat berdasarkan wilayah, secara keseluruhan bencana banjir posisi paling banyak terjadi di Jawa Barat, yakni 708 kejadian. Kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur menempati posisi berikutnya masing-masing 582 kejadian dan 557 kejadian. Dengan demikian Jawa Timur menjadi wilayah tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Disisi lain, pada tahun 2021, Jawa Timur menjadi wilayah dengan kejadian banjir tertinggi di Indonesia sebanyak 105 kejadian (Pusdalop BNPB, 2021).

Tabel 1.1. Nilai Indeks Risiko Bencana Banjir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1	SUMENEP	204.80	204.80	204.80	204.80	184.62	160.35	TINGGI
2	BLITAR	210.00	210.00	210.00	198.06	178.37	160.26	TINGGI
3	PAMEKASAN	180.40	180.40	180.40	180.40	172.53	160.19	TINGGI
4	JEMBER	219.20	219.20	219.07	198.80	182.18	158.19	TINGGI
5	PASURUAN	214.00	214.00	214.00	214.00	180.34	156.26	TINGGI
6	TRENGGALEK	198.00	198.00	198.00	170.91	151.25	151.25	TINGGI
7	KOTA SURABAYA	166.80	166.80	166.80	166.80	150.34	150.34	TINGGI
8	TUBAN	175.20	175.20	175.20	175.20	160.38	145.00	TINGGI
9	PROBOLINGGO	194.00	194.00	194.00	162.29	156.70	141.16	SEDANG
10	BANYUWANGI	219.20	208.71	206.44	168.29	151.91	137.92	SEDANG
11	TULUNGAGUNG	201.20	201.20	201.20	169.75	151.42	137.68	SEDANG
12	MALANG	219.20	219.20	199.81	142.10	137.09	133.20	SEDANG
13	KEDIRI	178.00	178.00	178.00	163.09	144.43	131.50	SEDANG
14	MAGETAN	152.80	152.80	152.80	152.80	135.80	131.26	SEDANG
15	MADIUN	155.20	155.20	155.20	155.20	134.81	130.18	SEDANG
16	BONDOWOSO	166.00	166.00	166.00	166.00	150.96	128.75	SEDANG
17	JOMBANG	154.80	154.80	154.80	154.80	138.40	128.55	SEDANG
18	SITUBONDO	168.40	168.40	168.40	168.40	149.35	128.39	SEDANG
19	SAMPANG	154.80	154.80	154.80	154.80	140.63	127.19	SEDANG
20	MOJOKERTO	163.60	163.60	163.60	163.60	140.94	123.74	SEDANG
21	KOTA PASURUAN	158.40	158.40	158.40	158.40	136.22	123.69	SEDANG
22	PACITAN	215.20	215.20	192.03	126.21	123.14	121.27	SEDANG
23	KOTA MOJOKERTO	142.80	142.80	142.80	142.80	133.95	120.57	SEDANG
24	NGAWI	143.20	143.20	143.20	143.20	131.06	119.98	SEDANG
25	BANGKALAN	164.40	164.40	158.66	139.01	129.50	118.71	SEDANG
26	NGANJUK	152.80	152.80	152.80	152.80	132.87	118.22	SEDANG
27	LUMAJANG	231.20	231.20	200.76	129.74	123.84	117.76	SEDANG
28	KOTA MADIUN	136.00	136.00	136.00	136.00	121.28	116.73	SEDANG
29	LAMONGAN	174.00	174.00	167.36	139.55	125.33	115.86	SEDANG
30	PONOROGO	155.20	155.20	155.20	140.77	127.14	115.60	SEDANG
31	KOTA PROBOLINGGO	148.40	148.40	148.40	148.40	129.83	114.16	SEDANG
32	KOTA KEDIRI	140.80	140.80	140.80	140.80	122.79	109.69	SEDANG
33	KOTA BLITAR	132.00	132.00	132.00	132.00	118.79	106.06	SEDANG
34	KOTA BATU	134.40	134.40	134.40	134.40	116.06	104.09	SEDANG
35	GRESIK	175.20	137.79	126.77	101.35	99.29	99.29	SEDANG
36	KOTA MALANG	113.60	113.60	113.60	113.60	100.77	91.26	SEDANG
37	BOJONEGORO	150.00	104.65	101.38	96.93	93.63	90.44	SEDANG
38	SIDOARJO	149.60	149.60	132.02	85.29	81.62	79.15	SEDANG

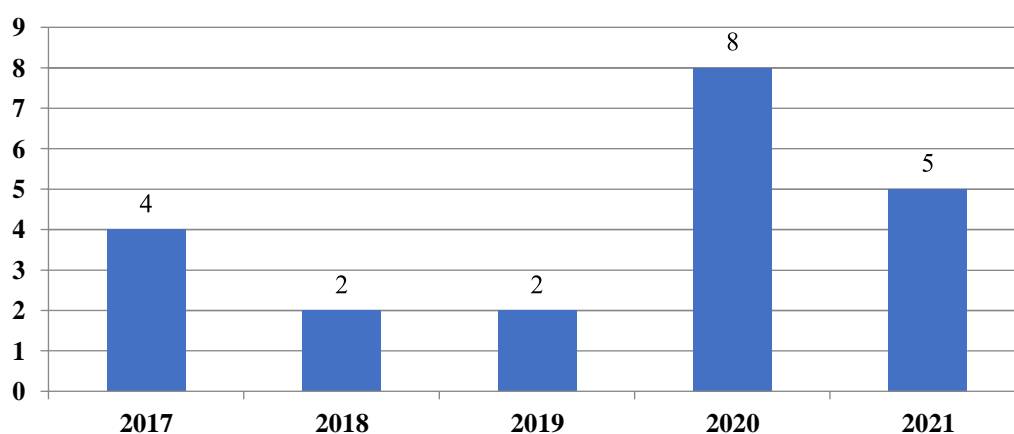
\*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020 oleh BNPB (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Sumenep memiliki indeks kelas resiko banjir tertinggi, sedangkan Kabupaten Sidoarjo memiliki indeks kelas resiko banjir terendah. Selain itu, selama kurun waktu tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020 menunjukkan Kabupaten Sidoarjo memiliki indeks resiko banjir paling rendah dibanding wilayah lain di Jawa Timur dengan nilai indeks tahun 2018 sebesar 85.29, tahun 2019 sebesar 81.62, dan tahun 2020 sebesar 79.15. Dapat disimpulkan, bahwa nilai indeks resiko bencana banjir Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan.

Meskipun memiliki indeks resiko terendah, bencana banjir yang telah terjadi di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017-2021 berjumlah 21 kejadian menyebabkan beberapa dampak merugikan bagi masyarakat diantaranya 321 orang mengungsi dan 34.954 terimbas (BNPB, 2021). Akibat kejadian banjir tersebut menimbulkan kerugian diantaranya rumah terendam banjir, akses terhambat, bahkan sampai menelan korban jiwa (Ilmi dkk., 2020).

Berikut ini bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo selalu terjadi setiap tahunnya dengan jumlah kejadian yang beragam dalam lima tahun terakhir.



Gambar 1.1. Kejadian Banjir di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021  
Sumber: dibi.bnpb.go.id yang diolah oleh Peneliti, Januari 2022

Melansir media berita Kompas.com (2021), seiring dengan pengembangan wilayah Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah industri, maka luas sawah menjadi berkurang sebab sebagian lahan sawah dijadikan daerah pemukiman dan industri. Akan tetapi pembangunan gedung-gedung dan jalan raya serta bangunan fasilitas penunjang lainnya tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana drainase yang memadai. Menurut BBWS Brantas dalam Purnawali (2018) hal tersebut dapat mengakibatkan respon kawasan konservasi terhadap masukan air hujan semakin rendah dan berpotensi terjadinya banjir atau genangan.

Dari data BNPB (2021), banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Banjir yang terjadi pada umumnya ketika musim hujan. Bencana banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Sidoarjo menimbulkan berbagai dampak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti terendamnya pemukiman, sawah, tambak, fasilitas umum dan lain sebagainya. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi lokal dan curah hujan. Curah hujan di daerah hulu dapat menyebabkan banjir di daerah hilir. Tetapi juga oleh aktivitas manusia yang memperparah bencana banjir yang berdampak negatif terhadap masyarakat, pemerintah, dan lingkungan seperti yang diberitakan pada Kompas.com (2021) sebagai berikut:

“Sebanyak empat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dikepung banjir sejak Rabu (17/2/2021) pagi. Hingga Rabu siang, banjir belum juga surut di wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo menyatakan, banjir meluas di 14 desa dalam empat kecamatan pada pukul 14.30 WIB. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 20 hingga 40 centimeter. Kecamatan yang terdampak banjir di antaranya, Candi, Sidoarjo, Porong, dan Tanggulangin. Banjir menggenangi permukiman warga dan jalan desa. Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito mengatakan, banjir berasal dari sejumlah sungai yang debit airnya sudah tinggi sejak Selasa k. Permukaannya sudah tinggi sejak kemarin. Dwijo mengaku sudah mengoptimalkan fungsi pompa air di sejumlah titik, namun debit air sungai tak kunjung turun hingga Rabu siang. Ada beberapa yang mengungsi di

rumah kerabatnya karena rumah yang ditempati tergenang banjir. Pemkab Sidoarjo, sudah menyiapkan sejumlah lokasi jika warga bersedia mengungsi seperti rusunawa dan kompleks balai desa.”

(<https://regional.kompas.com/read/2021/02/17/23542581/banjir-landa-4-kecamatan-di-sidoarjo-bpbd-sebut-akibat-luapan-sungai> diakses pada 3 Januari 2022 pukul 16:51 WIB).

Berdasarkan kutipan berita di atas, diketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana banjir yang cukup tinggi di wilayah Jawa Timur. Banjir yang terjadi pada tahun 2021 tersebut mengakibatkan empat kecamatan hingga sebagian rumah warga tergenang banjir. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang sehingga terkenal sebagai Kota Delta.

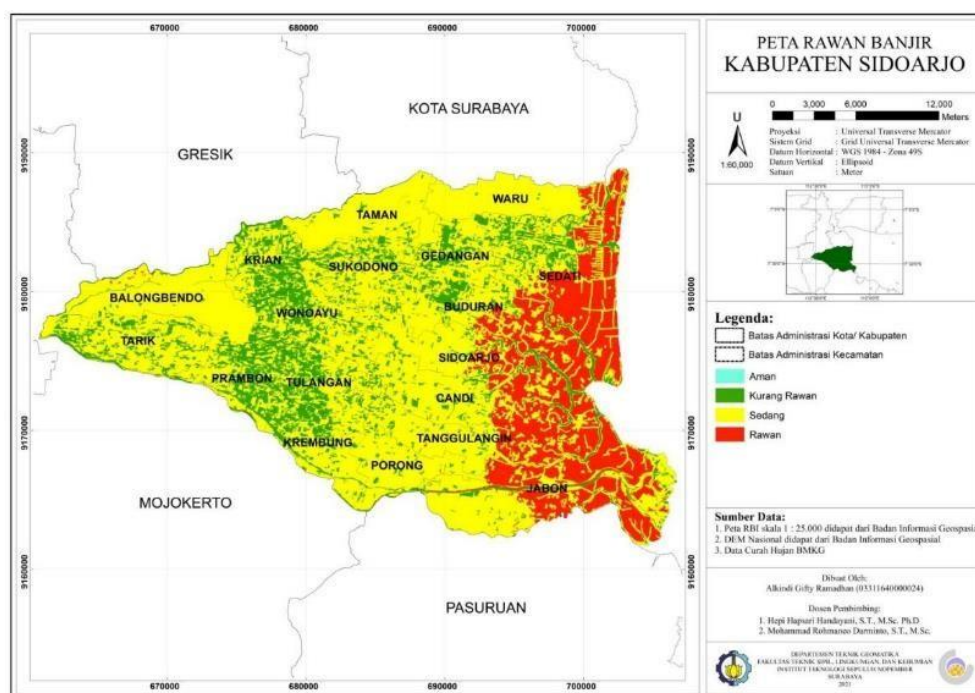
Banjir juga menyebabkan rusaknya tanggul-tanggul sehingga wilayah lain ikut terendam. Sejumlah tempat pengungsian disiapkan untuk menampung pengungsi, terutama warga lanjut usia dan anak-anak. Dampak banjir yang semakin parah terjadi di Kabupaten Sidoarjo tersebut diketahui dari laman berita Merdeka.com oleh Muhamad Agil Aliansyah (2021) sebagai berikut:

“Pemkab Sidoarjo menetapkan status tanggap darurat terkait banjir di tiga desa yaitu Desa Kedungbanteng, Desa Banjarasri, dan Desa Banjarpanji Kecamatan Tanggulangin. Status tanggap darurat itu berlaku mulai 7-21 Desember 2021. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengecek dan berkeliling ke tiga desa untuk berbincang dengan warga serta memastikan bantuan sembako terdistribusi dengan baik.”

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/3-desa-banjir-sidoarjo-tetapkan-status-tanggap-darurat.html> diakses pada 3 Januari 2022 pukul 14:36 WIB).

Kawasan tersebut menjadi desa yang terdampak paling parah dengan sepuluh rumah tergenang. Selain faktor air rob, curah hujan yang tinggi juga menjadi pelengkap terjadinya banjir di tiga desa tersebut. Disamping itu, berdasarkan

laporan warga yang diterima Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo dan pemantauan oleh BPBD Sidoarjo (2021) dalam website resminya [bpbd.sidoarjokab.go.id](http://bpbd.sidoarjokab.go.id), hujan telah merendam sebagian Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Porong. Hujan yang mengguyur membuat Desa Kedungbanteng, Banjarasri, Banjarpanji, Kalitengah, Gempolsari Kecamatan Tanggulangin tergenang. Air juga menggenangi Jalan Raya Porong, Desa Wunut, Pesawahan, Candipari, Pamotan dan Kedungsolo Kecamatan Porong. Banjir juga menggenangi wilayah Jabon dan sekitarnya mengakibatkan kerugian milyaran rupiah. Banjir menjebol 200 Ha area tambak siap panen, hingga mengakibatkan ikan dalam tambak terbawa arus banjir. Hal tersebut kemudian membuat sebagian besar wilayah Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah rentan banjir, yaitu sebesar 49,41% dari keseluruhan luas wilayah yang adadi Kabupaten Sidoarjo (BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021).



Gambar 1.2. Peta Rawan Banjir

Sumber: Raya & Prasetyo (2022)

Kondisi empiris di atas, dipertegas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al., (2021) di mana wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki kawasan kawasan dengan tingkat risiko sedang tersebar di seluruh Kabupaten Sidoarjo dengan luas sebesar 560,29 km<sup>2</sup>. Sementara kawasan dengan tingkat risiko tinggi hanya tersebar hampir meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon dan Kecamatan Tarik dengan luas sebesar 123,13 km<sup>2</sup>.

Menyadari dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kabupaten/kota untuk melakukan tindakan antisipatif sebelum datangnya bencana dengan harapan diantaranya dapat mereduksi dampak akibat yang ditimbulkan oleh bencana itu sendiri (Arif, 2020). Upaya untuk mengurangi akibat bencana itu disebut dengan mitigasi bencana. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 1 ayat 6 disebutkan mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Upaya mitigasi bencana yang harus dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana digolongkan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu mitigasi aktif dan mitigasi pasif. Kegiatan yang termasuk dalam mitigasi aktif adalah pelatihan dasar kebencanaan, pengadaan jalur evakuasi, dan lainnya. Sedangkan, kegiatan mitigasi pasif adalah penyusunan peraturan pemerintah, pembuatan peta rawan bencana, dan lainnya.

Adapun dalam tataran pelaksanaan di tingkat daerah, dalam hal ini yaitu pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki wewenang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan daerah tersebut digunakan sebagai dasar dalam mitigasi bencana di Kabupaten Sidoarjo. BPBD berkewajiban untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan mitigasi bencana banjir baik mitigasi secara aktif dan mitigasi secara pasif.

Penanganan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak baik instansi teknis maupun lembaga lain yang terkait serta masyarakat (Rosyidie, 2013). Senada dengan pernyataan tersebut, Nahar (2016) juga berpendapat bahwa dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, upaya penanggulangan bencana melalui mitigasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah.

Penanganan banjir telah menjadi program prioritas Bupati Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan harapan tercapainya persentase penurunan luas area rawan genangan banjir (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2019). Untuk mendukung program tersebut, sebelumnya dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 juga telah dipaparkan beberapa kegiatan mitigasi secara aktif di Kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah melakukan kegiatan pemetaan wilayah rawan banjir, membuat arahan pembangunan berdasarkan daerah rawan banjir (kecuali untuk taman dan fasilitas olah raga), dan dilanjutkan dengan kontrol



penggunaan lahan. Selain itu, ada juga program pengendalian banjir melalui pembangunan rumah pompa, perbaikan sungai dan waduk serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. Kemudian, berdasarkan data dalam laporan Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2021 lokasi penakar hujan terdapat di 30 titik berbeda yang tersebar di semua kecamatan di Sidoarjo.

Pada gambar di bawah ini dapat dilihat papan peta rawan bencana di desa- desa Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Sidoarjo.

Kategori	Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan
L1	0	0
L2	0	0
L3	0	0
P1	0	0
P2	0	0
L1P1	0	0
L2P1	0	0
L3P1	0	0
TOTAL	0	0

NOMOR TELEPON DARURAT  
 Polsek Tanggulangin : 031 - 896833  
 RSUD Tanggulangin / Ambulans : 031 - 896649  
 Pemadam Kebakaran : 031 - 896200  
 BPBD Jatim : 031 - 850122

Keterangan  
 L: Laki-laki  
 P: Perempuan

KKN UNITOMO TAHUN 2021

Gambar 1.3. Papan Peta Rawan Bencana di Kecamatan Tanggulangin  
Sumber: Sindonews.com (2021)

BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya tanggap padasaat banjir terjadi seperti pembangunan tanggul yang jebol, penyediaan pompa air hingga pemberian bantuan sembako kepada masyarakat terdampak. Terkait pembangunan kisdam, bahwa masalah pembangunan kisdam sedikit terhambat karena permukaan airnya tidak kunjung menurun (Suarasurabaya.net, 2022). Hal

ini tidak menggambarkan kondisi sebagaimana yang diungkapkan oleh Nursyabani dkk., (2020) bahwa upaya tanggap darurat akan lebih berhasil jika dibarengi dengan upaya mitigasi yang baik pula sehingga dapat mengurangi dampak kerugian akibat bencana banjir.

Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kepada masyarakat di Desa Banjar Asri, Banjar Panji, dan Kedungbanten di Kecamatan Tanggulangin mengatakan bahwa:

“Jadi di daerah kami itu, ketinggian air laut akan naik sampai 140 sentimeter. Kemudian ada air kiriman dari Barat ke Timur di lokasi desa rawan banjir Tanggulangin. Akhirnya saluran pembuangan atau irigasinya tidak mampu menampung lagi dan terjadi *overtop* (kelebihan), sehingga banjir. Meskipun sudah ada pompa tapi pompanya hanya untuk mengurangi volume banjir saja, jadi butuh proses dan harus nunggu.” (Hasil observasi peneliti pada 12 Januari 2023)

Meskipun telah dilakukan beberapa kegiatan mitigasi, namun pada kenyataannya, hasil paparan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSD) Wilayah Sungai Brantas yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) banjir di Kabupaten Sidoarjo bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sesuai peraturan pemerintah, sehingga terjadi penyempitan pada sungai. Kondisi ini diperparah tidak adanya kejelasan kewenangan sungai tersebut dan banyaknya lahan pertanian menjadi perumahan dan industri yang mengenyampingkan sistem drainase. Selain itu, proses normalisasi sungai tidak berjalan maksimal, misalnya saja Kali Buntung yang dinormalisasi baru 5 persen. Sementara Kali Sidokarebaru 10 sampai 20 persen, untuk Kali Kedunglarangan sudah dilakukan normalisasi BBWS, dengan proyek multi yes. Kemudian, kendala teknis ketika akan melakukan normalisasi sungai, alat berat tidak bisa masuk, karena lokasi dekat sungai padat rumah penduduk.

Adanya program pengendalian banjir melalui perbaikan sungai dan waduk serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi tidak mampu menjawab permasalahan banjir di Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut dibuktikan sebagian besar fungsi sungai sebagai saluran irigasi sekaligus saluran pematusan. Kondisi sistem drainase yang tidak mampu menampung luapan air selama hujan, kualitas pintu air dan saluran drainase yang menurun akibat pendangkalan karena tumpukan sampah, area resapan yang semakin hilang akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan industri, serta fluktuasi ketinggian air laut yang membuat aliran air dari daratan tertahan sehingga semakin memperparah bencana banjir (Subastian, 2014).

BPBD Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang strategis dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo. Dalam mitigasi bencana, BPBD Kabupaten Sidoarjo menerapkan strategi Panduan Pengelolaan Resiko Bencana (PPRB) Berbasis Komunitas yang diterapkan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Namun strategi PPRB Berbasis Komunitas kurang menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanggulangan bencana banjir karena, indeks resiko bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kejadian bencana banjir juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (BPBD Sidoarjo, 2022).

Permasalahan lainnya dalam mitigasi bencana di Kabupaten Sidoarjo juga ditemukan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 di mana sumber daya manusia (SDM) baik dari aparat penanggulangan bencana maupun masyarakat juga masih menjadi isu masalah strategis dalam mitigasi bencana di Kabupaten Sidoarjo. Adapun juga dalam strategi program yang di

khususkan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo, seperti melalui pengoptimalan fungsi DAS dan penggunaan pompa air memang telah dilakukan, namun tetap saja belum mampu mengatasi banyaknya debit air yang menggenangi di berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo, terutama saat meningkatnya curah hujan. Hal tersebut juga diperparah dengan kondisi sistem drainase di beberapa tempat di Kabupaten Sidoarjo belum dikelola secara baik dan tidak berjalan optimal karena berbagai masalah seperti penumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat dan tingginya sedimentasi yang memperlambat aliran air pada drainase (BPBD Sidoarjo, 2022).

Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan kepada masyarakat dimulai dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, peningkatan infrastruktur, sarana sosialisasi dan peringatan dini serta arahan pada masyarakat perlu ditingkatkan. Ketidaksiapan dalam menghadapi bencana banjir, terutama di daerah yang memiliki kawasan dengan tingkat resiko menengah ke tinggi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar (Saputra, 2022). Oleh karena itu, mitigasi bencana merupakan sebuah tuntutan bagi daerah/kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan bencana rendah hingga tingkat kerawanan yang tinggi.

Kondisi banjir di Kabupaten Sidoarjo yang terjadi setiap tahunnya, sudah menjadi masalah yang begitu kompleks, hal tersebut menjadikan mitigasi bencana secara aktif dan secara pasif menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting untuk menanggulangi permasalahan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan uraian penjelasan beberapa konsep teoritis dan fenomena empiris

terkait bencana banjir, akibat banjir, dan mitigasi bencana banjir, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan mitigasi banjir secara pasif dan secara aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **“Mitigasi Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dilandasi oleh latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana mitigasi bencana banjir secara pasif dan secara aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mitigasi bencana banjir secara pasif dan secara aktif yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bentuk pengembangan dari konsep mitigasi bencana yang digunakan untuk menganalisis tentang permasalahan bencana banjir yang terjadi khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pentingnya mitigasi bencana mengingat Indonesia termasuk negara dengan potensi bencana yang cukup tinggi dan beragam. Dengan

memahami mitigasi bencana penulis berharap dapat ikut meminimalisir dampak bencana dan selalu siap siaga ketika terjadi bencana. Selain itu, Peneliti lainnya juga diharapkan dapat memahami pentingnya mitigasi bencana melalui penelitian ini.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi tambahan di perpustakaan. Selain itu, melalui penelitian ini diharap pihak Universitas dapat memberikan pembelajaran mengenai penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana kepada mahasiswa, dosen, maupun pegawai.

3. Bagi BPBD Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam meminimalisir dampak serta risiko bencana banjir melalui mitigasi bencana.